

# Laporan Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output

Kabupaten Nganjuk

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	
			2	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Unit
			3	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	Orang
			4	3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	Orang
			5	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Orang
			6	5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Orang
			7	6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sebanyak .....	Orang
			8	7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sebanyak .....	Orang
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	9	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	10	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	
			11	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak .....	Unit
			12	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	Orang
			13	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	Orang
			14	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	Orang
			15	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	Orang
			16	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	Orang
			17	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	Orang
			18	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	Orang
			19	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	Orang
			20	10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	Orang
			21	11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	Orang
			22	12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak .....	Orang
			23	13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak .....	Orang
			24	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	Orang
			25	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak .....	Orang
			26	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			27	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	Orang
			28	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	Orang
			29	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak .....	Orang
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	30	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	
			31	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Unit
			32	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak .....	Orang
			33	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak .....	Orang
			34	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Orang
			35	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak .....	Orang
			36	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sebanyak .....	Orang
			37	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak .....	Orang
			38	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	39	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	
			40	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak .....	Unit
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	41	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	
			42	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak .....	Unit
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	43	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	
			44	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	
			45	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sebanyak .....	Orang
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	46	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	
			47	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	
			48	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	49	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	
			50	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....	
			51	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	52	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	
			53	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll	
			54	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	
			56	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll	
			57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	
			59	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , Dll	
			60	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota	
			62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , Dll	
			63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	
			65	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , Dll	
			66	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	
			68	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3 . Pedoman dan Media KIE , Dll	
			69	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	70	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	
			71	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4 . Media KIE , DII	
			72	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	73	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	
			74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , DII	
			75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	76	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV Di Kabupaten/Kota	
			77	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak .....  Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4 . Lainnya...	
			78	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	79	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	80	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m2) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m2)	
			81	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	Ha
			82	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	Meter
			83	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas .....	Ha
			84	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ....	Meter
			85	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
			86	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	
			87	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	Sarpras

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	88	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	
			89	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	
			90	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	
			91	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	92	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	
			93	1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	
			94	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	
			95	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Sebanyak .....	BUMD/UPTD
			96	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sebanyak .....	Izin
			97	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak .....	Kerjasama

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	
			99	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Sebanyak .....	Rumah
			100	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak .....	Rumah
			101	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sebanyak .....	Rumah
			102	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak .....	Rumah
			103	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Sebanyak .....	Rumah
			104	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak .....	Rumah
			105	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	? Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- X 100% ? Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	
			106	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	? rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----- X 100% ? rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	
			107	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	? rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- X 100% ? rumah di wilayah pengembangan SPALD T	
			108	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	? rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- X 100% ? jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	
			109	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	? Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- X 100% ? Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			110	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	? Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- X 100% ? Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	
			111	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	? Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ----- X 100% ? Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota	
			112	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	? Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot ----- X 100% ? Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	113	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	
			114	1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	? Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku ----- X 100% ? Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	
			115	2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak .....	Izin
			116	3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	
			117	4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	
			118	5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak .....	Bangunan
			119	6.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan srategis daerah provinsi	Sebanyak .....	Bangunan
			120	7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Bangunan
			121	8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak .....	Bangunan

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	122	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota	
			123	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang ....	KM
			124	2. Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang ....	KM
			125	3. Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang ....	Meter
			126	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang ....	KM
			127	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang ....	Meter
			128	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang ....	KM
			129	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang ....	Meter
			130	8. Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang ....	KM
			131	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang ....	Meter

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	132	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	
			133	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Orang
			134	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Orang
			135	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Orang
			136	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	
			137	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	
			138	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	
			139	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	
			140	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	
			141	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	
			142	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	
			143	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada/Tidak	
			144	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	
			145	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			146	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	
			147	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	
			148	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	
			149	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	
			150	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Badan Usaha
			151	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Badan Usaha
			152	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Badan Usaha
			153	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Badan Usaha
			154	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak .....	Izin
			155	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	Pengawasan
			156	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	Kecelakaan Konstruksi
			157	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak .....	Pengawasan
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	158	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	159	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021	
			160	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sebanyak .....	Rumah
			161	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak .....	Rumah
			162	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak .....	Orang
			163	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	Rumah
			164	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	Rumah
			165	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak .....	Rumah
			166	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak .....	Unit
			167	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak .....	Orang
			168	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas .....	Ha

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	169	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	
			170	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			171	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			172	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			173	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			174	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			175	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas .....	Ha
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	176	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	
			177	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Seluas .....	Ha
			178	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak .....	Unit
			179	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Seluas .....	Ha

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	180	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	
			181	1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Rumah
			182	2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak .....	Rumah
			183	3. Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak .....	Rumah
			184	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak .....	Rumah
			185	5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- x 100% Jumlah total unit rumah	
			186	6. Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak .....	Rumah
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	187	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	
			188	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak .....	Perumahan
			189	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak .....	Rumah
			190	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak .....	Rumah
			191	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak .....	Rumah
			192	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak .....	Perumahan
			193	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak .....	Rumah
			194	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak .....	Pengembang
			195	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak .....	Pengembang
			196	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak .....	Pengembang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	197	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		
			198	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak .....	Pelanggaran dan Pengaduan	
			199	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak .....	Orang	
			200	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak .....	Perda & Perkada	
			201	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak .....	Orang	
			202	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Sebanyak SOP	
			203	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	204	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	205	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak .....	Orang
		206		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		
		207		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	208	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak .....	Orang
			209	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	
			210	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	
			211	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	
			212	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	
			213	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	
			214	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	215	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak .....	Orang
			216	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	
			217	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	
			218	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	
			219	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	220	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	
			221	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Layanan
			222	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	
			223	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	
			224	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	Pos
			225	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak ..... (Dibuat dalam bentuk daftar)	Sarpras
			226	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sebanyak .....	Orang
			227	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak .....	Orang
			228	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sebanyak .....	Kegiatan
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	229	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	Menit

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	230	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	
			231	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah .....	Layanan
			232	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sebanyak .....	Orang
			233	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak .....	Tim
			234	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak .....	Orang
			235	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak .....	Unit
			236	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Sebanyak .....	Orang
			237	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak .....	Unit
			238	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sebanyak .....	Orang
			239	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak .....	Orang
			240	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak .....	Peralatan
			241	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak .....	Paket
			242	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak .....	Orang
			243	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak .....	Orang
			244	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Sebanyak .....	Orang
			245	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			246	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak .....	Kegiatan
			247	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak .....	Orang
			248	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sebanyak .....	Orang
			249	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Sebanyak .....	Orang
			250	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak .....	Orang
			251	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sebanyak .....	Orang
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	252	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	
			253	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak .....	Orang
			254	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak .....	Orang
			255	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak .....	Penampungan
			256	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak .....	Paket
			257	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak .....	Orang
			258	6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak .....	Orang

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	259	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	
			260	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	
			261	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%  realisasi indikator - Target indikator ----- X 100% Realisasi	
			262	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Perusahaan

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	263	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga keseluruhan	
			264	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ----- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	
			265	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	
			266	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	
			267	4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	
			268	5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	
			269	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak .....	Orang
			270	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- X 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	
			271	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- X 100% jumlah lulusan pada tahun n	
			272	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	
			273	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	
			274	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ... ----- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n  Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	275	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	
			276	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	
			277	2. Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	278	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	
			279	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	
			280	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	
			281	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sebanyak .....	SP/SB
			282	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah... ----- X 100% Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	
			283	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	
			284	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	
			285	7. Jumlah mogok kerja	Sebanyak .....	Mogok Kerja
			286	8. Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak .....	Perusahaan
			287	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah .....	Perselisihan
			288	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah .....	Perselisihan
			289	11. Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah .....	Perselisihan
			290	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak .....	Orang
			291	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah .....	Perselisihan
			292	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	
			293	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	294	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	
			295	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Lowongan Kerja
			296	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Orang
			297	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	BKK
			298	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Orang
			299	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sebanyak .....	Orang
			300	6. Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Lembaga
			301	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Perjanjian
			302	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak .....	Orang
			303	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- X 100% Jumlah CPMI/CTKI	
			304	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak .....	Orang
			305	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- X 100% Jumlah PMI yang pulang	
			306	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- X 100% Jumlah PMI/TKI	
			307	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	
			308	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	309	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD		
			310	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Sebanyak .....	Lembaga	
			311	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Program/Kegiatan	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	312	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) di Kabupaten/Kota	
		313		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sebanyak .....	Media Massa	
		314		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak .....	Lembaga	
		315		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota		
		316		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	Lembaga	
		317		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak .....	Lembaga	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	318	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	
			319	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Sebanyak .....	Organisasi
			320	2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak .....	Orang
			321	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak .....	Lembaga
			322	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak .....	Lembaga
			323	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sebanyak .....	Kebijakan/Program
			324	6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak .....	Lembaga
			325	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	326	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	
			327	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	
			328	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	
			329	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	
			330	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	
			331	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	
			332	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	
			333	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	
			334	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	335	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
			336	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	
			337	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	
			338	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	
			339	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	
			340	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	341	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	342	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	343	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar semua dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	344	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	345	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	346	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	Indeks Kualitas Pencemaran Air Indeks Kualitas Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan	
			347	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Indeks Kualitas Pencemaran Air Indeks Kualitas Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan	
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	348	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total Volume Timbunan sampah Kabupaten/Kota	
				349	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	350	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	
				351	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	
				352	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
				353	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- X 100% Jumlah usulan MHA	
				354	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- X 100% Jumlah MHA yang ada	
				355	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	
		356	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi			

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	357	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	
			358	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	
			359	2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	
			360	3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	
			361	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ----- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	
		362	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun		
		363	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	364	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	365	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2022)	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	366	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2022)	
			367	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak .....	Desa
			368	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak .....	Desa
			369	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sebanyak .....	Lembaga
			370	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak .....	Desa

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	371	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	TFR (Angka Kelahiran Total) 5?ASFR		
			372	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK		
			373	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		
			374	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
			375	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		
			376	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sebanyak .....	Stakeholder	
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	377	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	
		378		1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- X 100% Jumlah faskes		
		379		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- X 100% Jumlah pasangan usia subur		
		380		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak .....	Kelompok Kerja KKBPK	
		381		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- X 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan  KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari		

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	382	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	
			383	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota	
			384	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- X 100% Jumlah keluarga PBI  Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	385	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut</p> <p>o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut )</p> <p>Keterangan:            IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30)</li> <li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50)</li> <li>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70)</li> <li>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100)</li> </ol> <p>Bobot trayek atau lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (&gt;5x dalam seminggu), bobot= 1</li> <li>b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8</li> <li>c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (&lt;3 dalam seminggu), Bobot=0.5</li> </ol>	
			386	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	<p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan</p>	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			387	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	
			388	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- X 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	
			389	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	390	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	
			391	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	392	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	
	393		1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah		
	394		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah		
	395		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak		

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	396	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	
			397	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	
			398	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	
			399	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	
			400	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- X 100% Jumlah Layanan	
			401	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- X 100% Jumlah layanan	
			402	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	
			403	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- X 100% layanan publik dan layanan administrasi	
			404	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	
			405	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			406	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	
			407	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	
			408	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	
			409	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah ASN pengelola TIK	
			410	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ? Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ? Penganggaran ? Strategi ? Peta Jalan ? Arah Kebijakan ? Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk	
			412	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
			413	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- X 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	
			414	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- X 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	415	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	
			416	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	
			417	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	
			418	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			419	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	
			420	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			421	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- X 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	
			422	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			423	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	
			424	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			425	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			426	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			427	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
			428	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	429	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	
			430	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	
			431	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	
			432	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	
			433	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	
			434	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	
			435	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	
			436	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	437	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah Investasi tahun 2022 - jumlah Investasi tahun 2021) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun 2021 di Kabupaten/Kota	
			438	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak .....	
			439	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	
			440	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak .....	Laporan
			441	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak .....	Kegiatan
			442	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak .....	Kegiatan
			443	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak .....	Kegiatan
			444	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	Konsultasi
			445	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak .....	Izin
			446	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak .....	Laporan Realisasi Penanaman Modal Rp.
			447	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak .....	Aparatur
			448	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak .....	Perusahaan
			449	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak .....	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	450	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	
			451	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak .....	Orang
			452	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak .....	Orang
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	453	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	
			454	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Sebanyak .....	Orang
			455	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Sebanyak .....	Orang
		Peningkatan prestasi olahraga	456	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali/Penghargaan
			457	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak .....	Orang
			458	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak .....	Event/Kegiatan

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	459	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	
			460	1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	
			461	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	Survey
			462	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak .....	Kompilasi
			463	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak .....	Survey
			464	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak .....	Kompilasi
			465	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	
			466	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	467	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	468	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	
			469	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- X 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada  Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	
			470	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- X 100% Jumlah SE yang ada  Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll  Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			471	3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<p>Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- X 100% Jumlah SE yang ada</p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>	
			472	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	<p>Jumlah titik teramankan ----- X 100% Jumlah titik pada PHKS</p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	473	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	
			474	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak .....	Obyek
			475	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak .....	Obyek
			476	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak .....	Obyek
			477	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak .....	Orang
			478	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemerinktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak .....	Cagar Budaya
			479	6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak .....	Cagar Budaya
			480	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak .....	Cagar Budaya
			481	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak .....	Cagar Budaya
			482	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak .....	Cagar Budaya
			483	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak .....	Koleksi
			484	11a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak .....	Orang
			485	11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak .....	Orang
			486	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)	
			487	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak .....	Tim
			488	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak .....	Tim

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			489	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak .....	Orang
			490	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak .....	Orang
			491	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak .....	Orang
			492	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak .....	Unit
			493	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak .....	Kegiatan

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	494	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	
			495	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	
			496	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	
			497	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	
			498	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya  Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	
			499	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak .....	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	500	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan  UPLM 2 = Ketercukupan koleksi  UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan  UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan  UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP  UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan  UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p>	
			501	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Sebanyak .....	Naskah Kuno
			502	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak .....	Naskah Kuno
			503	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	<p>Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak .....</p> <p>Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan</p>	Budaya Etnis

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	504	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = \frac{(a+i+s+j)}{4}$ <p>T = tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN</p>	
			505	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  ----- X 100%  Jumlah seluruh arsip aktif</p> <p>Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi  Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif  Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	
			506	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  ----- X 100%  Jumlah seluruh arsip inaktif</p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier  Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif  Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	
			507	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<p>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  ----- X 100%  Jumlah seluruh arsip statis</p> <p>Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012  Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012</p>	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			508	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan Kabupaten/Kota  Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datarnya di aplikasi SIKN/JIKN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	509	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	
			510	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)	Arsip
			511	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Arsip
			512	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	Arsip
			513	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	Arsip
			514	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	Arsip
			515	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis (Jumlah Arsip)	Arsip

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	516	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Ton) (sumber data: one data KKP)	Ton
			517	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Sebanyak .....	Rumah Tangga
			518	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	
			519	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak .....	Izin
			520	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	Sebanyak .....	Pembudidaya
			521	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak .....	Ekor

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	522	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun 2022 - Jumlah wisatawan tahun 2021 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2021	
			523	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak .....	Kawasan
					Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	
			524	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak .....	Sarpras
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian</li> <li>• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata</li> </ul>	
			525	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak .....	TDUP
					<ul style="list-style-type: none"> <li>o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik usaha</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> <li>• Jasa transportasi wisata</li> <li>• Jasa perjalanan wisata</li> <li>• Jasa makanan dan minuman</li> <li>• Penyediaan akomodasi</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>• Jasa informasi pariwisata</li> <li>• Jasa konsultan pariwisata</li> <li>• Jasa pramuwisata</li> <li>• Wisata tirta</li> <li>• Spa</li> </ul> </li> </ul>	
			526	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Sebanyak .....	Orang
			527	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	Kegiatan
			528	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak ..... (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	Kegiatan

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			529	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak ..... Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	Industri
			530	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata  Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	
			531	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	
			532	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak ....	Lokasi
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	533	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah wisatawan tahun 2022 - Jumlah wisatawan tahun 2021) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2021	
		Tingkat Hunian Akomodasi	534	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	535	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Kontribusi PDRB (dalam satuan Rupiah) dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB (dalam satuan Rupiah)	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	536	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ----- x 100% Jumlah total PAD	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	537	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	
			538	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak .....	Unit
			539	2. Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak .....	Unit
			540	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak .....	Dokumen
			541	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	
			542	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	
		543	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2022 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2021 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2021		
28	KEHUTANAN	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	545	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	
			546	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak .....	Kelompok Masyarakat
			547	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi .....ha	Ha
			548	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Kejadian
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	549	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	
			550	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak .....	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	551	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota	
			552	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ?5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	
			553	--	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ?5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	
			554	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ?5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	
			555	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- X 100% Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	
			556	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :  Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri	
			557	--	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :  Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri	
			558	--	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :  Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri	
			559	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
			560	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ?1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	
			561	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%
			562	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	563	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Realisasi ----- x 100% RDKK	
			564	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	565	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	
			566	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan ----- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	
			567	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	568	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021	
			569	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	570	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP	
			571	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e. Penetapan Perda RPIK (10%)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	572	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
			573	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	574	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
			575	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	
		576	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		

No.	URUSAN	IKK OUTCOME/HASIL	No.	IKK OUPUT/KELUARAN	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	577	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) 6. Informasi tenaga kerja (10%) 7. Informasi Investasi (10%)
			578	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	579	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Kawasan
			580	2. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak ..... (Satuan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	Permukiman
			581	3. Jumlah satuan permukiman yang dibina	Jumlah satuan permukiman yang dibina sebanyak .....	Permukiman